

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS TERHADAP PENANGANAN STUNTING DI KABUPATEN BANDUNG

Septi Wulandari^{*1}, Pandji Santosa², Tofan Hidayat³, Rizal Permana⁴, Yaya
Sunarya⁵

Universitas Langlangbuana Bandung

wulandarsepti25@gmail.com* pandjisantosa@gmail.com tofan.hidayat@unwir.ac.id
rizalpermana97@gmail.com Stempelples@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini didasari oleh stunting yang masih menjadi salah satu permasalahan kesehatan masyarakat yang serius di Indonesia, termasuk di Kabupaten Bandung. Tingginya angka stunting menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya pada kelompok rentan, masih menjadi tantangan yang perlu ditangani secara komprehensif. Pemerintah Indonesia melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berupaya meningkatkan kualitas konsumsi makanan bergizi sebagai bagian dari strategi percepatan penurunan stunting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Program Makan Bergizi Gratis terhadap penanganan stunting di Kabupaten Bandung. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan eksplanatif. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program. Analisis penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan dari Edward III yang meliputi empat indikator utama yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program MBG di Kabupaten Bandung telah berjalan melalui koordinasi antara pemerintah daerah dan instansi terkait, namun masih menghadapi beberapa tantangan pada aspek komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya manusia, serta koordinasi antarinstansi. Meskipun demikian, program ini memiliki potensi yang besar dalam mendukung peningkatan asupan gizi masyarakat dan upaya penurunan stunting apabila dilaksanakan secara optimal dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi, peningkatan sumber daya, serta pemantauan program secara berkala agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif dalam mendukung penanganan stunting di Kabupaten Bandung.

Kata Kunci: **Implementasi Kebijakan; Makan Bergizi Grati; Stunting**

ABSTRACT

This study is motivated by the fact that stunting remains one of the most serious public health issues in Indonesia, including in Bandung Regency. The high prevalence of stunting indicates that fulfilling the nutritional needs of the community, particularly among vulnerable groups, is still a major challenge that requires comprehensive intervention. The Indonesian government has introduced the Free Nutritious Meal Program (MBG) as part of its strategy to accelerate stunting

reduction by improving access to nutritious food. This study aims to analyze the implementation of the Free Nutritious Meal Program policy in addressing stunting in Bandung Regency. This research uses a quantitative method with descriptive and explanatory approaches. Data were collected through questionnaires, observations, and documentation involving stakeholders responsible for the implementation of the program. The analysis applies Edward III's policy implementation theory, which includes four main indicators: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results show that the implementation of the MBG program in Bandung Regency has been carried out through coordination between local government and related agencies. However, several challenges remain, particularly in policy communication, the availability of human resources, and coordination among institutions. Nevertheless, the program has significant potential to improve community nutritional intake and contribute to stunting reduction if implemented effectively and sustainably. Therefore, strengthening coordination, improving resources, and conducting regular program monitoring are necessary to ensure the effectiveness of the policy implementation in addressing stunting in Bandung Regency.

Keywords: *Policy Implementation; Free Nutritious Meal Program; Stunting*

PENDAHULUAN

Stunting masih menjadi salah satu permasalahan kesehatan masyarakat yang serius di Indonesia. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis yang berlangsung dalam jangka waktu lama (Warastuti, 2023), terutama pada periode 1000 hari pertama kehidupan. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga berpengaruh terhadap perkembangan kognitif, produktivitas, serta kualitas sumber daya manusia di masa depan (Organization, 2018). Stunting selama ini masih belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat luas (Lutfia Bakari, Yahya Antu, 2023). Berdasarkan data nasional, prevalensi stunting pada anak di bawah usia lima tahun di Indonesia pada tahun 2024 tercatat sekitar 21,5% (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2024).

Permasalahan stunting juga masih ditemukan di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Bandung. Stunting dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti asupan gizi yang tidak memadai, kondisi kesehatan, sanitasi lingkungan, serta faktor sosial ekonomi keluarga (Fund, 2021). Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, kasus stunting masih ditemukan di sejumlah kecamatan dengan tingkat kerentanan yang cukup tinggi, seperti Kecamatan Baleendah, Dayeuhkolot, dan Majalaya. Wilayah-wilayah tersebut memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi serta menghadapi berbagai tantangan sosial ekonomi yang dapat memengaruhi status gizi anak.

Perkembangan stunting di Kabupaten Bandung mencerminkan tantangan implementasi kebijakan gizi local (Aulia Aghyantje Tajudin, 2026). Data yang dihimpun dari Open Data Jawa Barat menunjukkan bahwa prevalensi stunting pada balita di

Kabupaten Bandung mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir. Secara umum, angka stunting menunjukkan tren penurunan pada periode 2014–2021, namun kembali mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1 Persentase Balita Stunting di Kabupaten Bandung Tahun 2014–2024

Tahun	Persentase Balita Stunting (%)
2014	17,14
2015	17,02
2016	17,20
2017	16,50
2018	15,80
2019	14,90
2020	14,40
2021	14,10
2022	25,00
2023	29,20
2024	24,10

Sumber: (Open Data Jawa Barat, 2024)

Berdasarkan Tabel 1, prevalensi stunting di Kabupaten Bandung menunjukkan tren penurunan dari tahun 2014 hingga 2021. Namun demikian, pada tahun 2022 hingga 2023 terjadi peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai sekitar 29,2% pada tahun 2023, yang menunjukkan bahwa permasalahan stunting masih menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah. Pada tahun 2024 prevalensi stunting kembali mengalami penurunan menjadi sekitar 24,1%, namun angka tersebut masih tergolong cukup tinggi dan memerlukan upaya penanganan yang berkelanjutan (Open Data Jawa Barat, 2024).

Selain data statistik resmi, beberapa laporan media juga menunjukkan adanya peningkatan kasus stunting di Kabupaten Bandung. Salah satu laporan menyebutkan bahwa prevalensi stunting di Kabupaten Bandung mengalami kenaikan sekitar 4% dari tahun 2022 ke tahun 2023, yaitu dari sekitar 25% menjadi sekitar 29% (Radar Bandung, 2023) Kondisi ini menunjukkan bahwa angka stunting di Kabupaten Bandung masih berada di atas rata-rata nasional yang berada pada kisaran 21,5%.

Sebagai upaya menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintah pusat meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditujukan bagi anak usia sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita. Program ini diharapkan dapat meningkatkan asupan gizi masyarakat sekaligus menjadi bagian dari strategi percepatan

penurunan stunting (BKKBN, 2024). Program intervensi gizi melalui penyediaan makanan bergizi di sekolah juga dinilai dapat meningkatkan kualitas asupan nutrisi anak dan mendukung pertumbuhan yang optimal (Food and Agriculture Organization, 2020)

Dalam konteks daerah, peran pemerintah daerah menjadi krusial dalam mengadaptasi kebijakan nasional ke dalam konteks lokal, baik dari aspek perencanaan anggaran, distribusi pangan, pengawasan program, maupun koordinasi antar pemangku kepentingan. Pemerintah Kota Bandung misalnya telah mengalokasikan sekitar Rp26 miliar dari APBD 2025 untuk mendukung pelaksanaan program MBG (Kompas, 2024) Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bandung juga menyiapkan anggaran hampir Rp100 miliar untuk mendukung program pemenuhan gizi sebagai bagian dari upaya penanganan stunting (Jabar, 2024).

Meskipun demikian, pelaksanaan program MBG tidak terlepas dari berbagai tantangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa program intervensi gizi pemerintah memiliki potensi besar dalam meningkatkan status gizi masyarakat, namun implementasinya sering menghadapi kendala seperti keterbatasan anggaran, rantai pasok pangan, distribusi logistik, serta keberlanjutan program (Hoddinott, J., Alderman, H., Behrman, J., Haddad, L., & Horton, 2013). Oleh karena itu, keberhasilan program sangat bergantung pada efektivitas implementasi kebijakan di tingkat daerah.

Dalam perspektif kesehatan masyarakat, upaya penanganan stunting juga sejalan dengan konsep Life Cycle Approach yang dikembangkan oleh World Health Organization (WHO). Pendekatan ini menekankan bahwa status gizi seseorang dipengaruhi oleh kondisi pada setiap tahap kehidupan, mulai dari masa kehamilan, bayi, anak-anak, hingga remaja dan dewasa (Organization, 2018). Dengan demikian, intervensi gizi tidak hanya difokuskan pada balita, tetapi juga pada anak usia sekolah sebagai upaya pencegahan stunting dalam jangka panjang.

Secara konseptual, implementasi kebijakan menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan suatu program pemerintah. Untuk menganalisis implementasi kebijakan MBG, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III, yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi (Edwards III, 1980).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan eksplanatif untuk menganalisis pengaruh implementasi kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap penanganan stunting di Kabupaten Bandung (Moleong Lexy, 2017) Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menguji hubungan antara variabel implementasi kebijakan sebagai variabel independen dan penanganan stunting sebagai variabel dependen melalui analisis statistik (John W. Creswell, 2014).

Populasi penelitian meliputi pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG di Kabupaten Bandung, seperti aparat pemerintah daerah dan tenaga kesehatan. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan pertimbangan tertentu yang dianggap memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan program (Sugiyono, 2017).

Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Variabel implementasi kebijakan dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III yang mencakup empat indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Edwards III, 1980). Sementara itu, variabel penanganan stunting merujuk pada kerangka konseptual UNICEF mengenai faktor-faktor penyebab stunting (Fund, 2021). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan regresi sederhana untuk mengetahui pengaruh implementasi kebijakan MBG terhadap penanganan stunting di Kabupaten Bandung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam upaya penanganan stunting di Kabupaten Bandung. Hasil penelitian diperoleh melalui pengumpulan data menggunakan kuesioner, observasi, serta studi dokumentasi yang melibatkan aparat pemerintah daerah dan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan MBG di Kabupaten Bandung telah mulai dilaksanakan melalui koordinasi antara pemerintah daerah, instansi terkait, serta pihak sekolah sebagai pelaksana program di tingkat lapangan (Bhutta, Z. A., Das, J. K., Rizvi, A., Gaffey, M., Walker, N., Horton, S., Webb, P., Lartey, A., & Black, 2013).

Berdasarkan hasil pengumpulan data, diketahui bahwa pelaksanaan program MBG di Kabupaten Bandung bertujuan untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak usia sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Program ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mempercepat penurunan angka stunting melalui intervensi gizi yang lebih terintegrasi. Upaya peningkatan kualitas konsumsi makanan bergizi dinilai penting karena kekurangan gizi dalam jangka panjang dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak (Prendergast, A. J., & Humphrey, 2014).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi program MBG di Kabupaten Bandung didukung oleh berbagai kebijakan nasional yang menekankan pentingnya intervensi gizi dalam penanganan stunting. Salah satu kebijakan tersebut adalah Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang menekankan pentingnya intervensi gizi spesifik dan sensitif secara terintegrasi. Intervensi gizi tersebut bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat melalui penyediaan makanan yang bergizi dan seimbang bagi kelompok sasaran.

Selain itu, hasil observasi menunjukkan bahwa pelaksanaan program MBG juga melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dalam mendukung pelaksanaan program. Keterlibatan berbagai sektor tersebut menunjukkan bahwa penanganan stunting memerlukan pendekatan lintas sektor yang terintegrasi. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa keberhasilan program penanganan stunting sangat dipengaruhi oleh koordinasi antarinstansi serta dukungan kebijakan yang konsisten dari pemerintah.

Dalam pelaksanaan program MBG, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengoordinasikan berbagai sumber daya yang tersedia, baik dari aspek anggaran, sumber daya manusia, maupun sarana pendukung program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan pemerintah daerah terhadap program MBG menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal. Hal ini sejalan dengan pendapat Edward III yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya serta mengoordinasikan berbagai aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan.

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Bandung telah berjalan melalui berbagai bentuk koordinasi antarinstansi serta dukungan kebijakan pemerintah daerah. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan program masih memerlukan penguatan pada aspek komunikasi kebijakan, kesiapan sumber daya, serta mekanisme koordinasi antarinstansi agar tujuan program dalam mendukung penanganan stunting dapat tercapai secara optimal.

PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bandung dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III, yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi (Edward III, 1980). Keempat dimensi tersebut menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif di tingkat daerah.

Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan karena berkaitan dengan bagaimana informasi mengenai kebijakan disampaikan kepada para pelaksana dan pihak yang terlibat dalam program. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu aparatur di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, diketahui bahwa sosialisasi mengenai Program Makan Bergizi Gratis telah dilakukan melalui berbagai forum koordinasi yang melibatkan pemerintah daerah, pihak sekolah, serta tenaga kesehatan di tingkat kecamatan.

Informan menyampaikan bahwa pemerintah daerah menerima arahan dan pedoman pelaksanaan program dari pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional, yang kemudian disosialisasikan kepada perangkat daerah terkait. Sosialisasi tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi, kegiatan pembinaan, serta penyampaian informasi melalui surat edaran kepada instansi yang terlibat dalam pelaksanaan program.

Namun demikian, berdasarkan hasil observasi di lapangan, proses komunikasi kebijakan masih menghadapi beberapa kendala. Beberapa pihak sekolah menyampaikan bahwa informasi mengenai mekanisme teknis pelaksanaan program, seperti prosedur distribusi makanan, standar kandungan gizi, serta mekanisme pengawasan program masih memerlukan penjelasan yang lebih rinci. Selain itu, terdapat perbedaan tingkat pemahaman antar pelaksana di lapangan mengenai peran masing-masing instansi dalam pelaksanaan program.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan masih perlu diperkuat, khususnya dalam hal konsistensi penyampaian informasi dan kejelasan petunjuk teknis pelaksanaan program. Komunikasi yang efektif akan membantu seluruh pelaksana kebijakan memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan dan mekanisme pelaksanaan program, sehingga implementasi kebijakan dapat berjalan lebih optimal.

Sumber Daya

Faktor sumber daya menjadi salah satu aspek yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya yang dimaksud tidak hanya mencakup ketersediaan anggaran, tetapi juga meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta dukungan kelembagaan yang memadai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pejabat pemerintah daerah, diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung telah menunjukkan komitmen yang cukup kuat dalam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dengan menyiapkan anggaran yang cukup besar untuk mendukung program pemenuhan gizi masyarakat. Dukungan anggaran tersebut diharapkan dapat digunakan untuk mendukung penyediaan bahan makanan, pengolahan makanan, serta distribusi makanan kepada kelompok sasaran program.

Selain dukungan anggaran, keterlibatan berbagai organisasi perangkat daerah seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta instansi terkait lainnya juga menjadi bagian penting dalam penyediaan sumber daya bagi pelaksanaan program. Setiap instansi memiliki peran yang berbeda sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dalam mendukung implementasi kebijakan.

Meskipun demikian, hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya manusia masih menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan program. Beberapa informan menyampaikan bahwa pelaksanaan program

MBG membutuhkan tenaga tambahan yang bertugas dalam proses penyediaan makanan, pengawasan kualitas makanan, serta distribusi makanan kepada kelompok sasaran.

Selain itu, ketersediaan sarana pendukung seperti fasilitas dapur, peralatan pengolahan makanan, serta sistem distribusi makanan juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, pelaksanaan program berpotensi mengalami kendala dalam hal efektivitas dan keberlanjutan program.

Disposisi (Sikap Pelaksana)

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan merupakan faktor yang berkaitan dengan komitmen, motivasi, serta tingkat penerimaan para pelaksana terhadap kebijakan yang dijalankan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa aparatur pemerintah daerah dan tenaga kesehatan, diketahui bahwa sebagian besar pelaksana memiliki sikap yang positif terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Para pelaksana menilai bahwa program ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat serta mendukung upaya penurunan angka stunting. Salah satu informan menyampaikan bahwa program ini memiliki potensi yang besar dalam membantu meningkatkan asupan gizi anak-anak, terutama bagi keluarga yang memiliki keterbatasan akses terhadap makanan bergizi.

Selain itu, beberapa informan juga menyampaikan bahwa pelaksanaan program MBG dapat memberikan dampak positif terhadap kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan gizi seimbang bagi anak. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai program pemberian makanan, tetapi juga sebagai sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya pola makan yang sehat dan bergizi.

Namun demikian, terdapat pula beberapa kekhawatiran yang disampaikan oleh para pelaksana terkait keberlanjutan program dalam jangka panjang. Beberapa informan menyatakan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada konsistensi dukungan anggaran serta kesiapan sistem pelaksanaan di tingkat daerah. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh pihak yang terlibat agar program dapat berjalan secara berkelanjutan.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan faktor yang berkaitan dengan pembagian kewenangan, mekanisme koordinasi antarinstansi, serta prosedur operasional dalam pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa aparatur pemerintah daerah, diketahui bahwa implementasi Program Makan Bergizi Gratis melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah yang memiliki peran masing-masing.

Dinas Kesehatan memiliki peran dalam melakukan pemantauan status gizi masyarakat serta memastikan bahwa makanan yang disediakan memenuhi standar kesehatan dan gizi yang telah ditetapkan. Sementara itu, Dinas Pendidikan memiliki

peran dalam mengoordinasikan pelaksanaan program di lingkungan sekolah, khususnya dalam hal distribusi makanan kepada anak-anak sebagai kelompok sasaran program.

Selain kedua instansi tersebut, beberapa instansi lain seperti dinas sosial dan pemerintah desa juga memiliki peran dalam mendukung pelaksanaan program melalui berbagai kegiatan pendukung yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga.

Hasil observasi menunjukkan bahwa koordinasi antarinstansi telah dilakukan melalui berbagai forum pertemuan dan rapat koordinasi yang bertujuan untuk menyelaraskan pelaksanaan program di tingkat daerah. Namun demikian, beberapa informan menyampaikan bahwa masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperjelas, terutama terkait pembagian tugas dan tanggung jawab antarinstansi dalam pelaksanaan program.

Struktur birokrasi yang jelas dan terkoordinasi dengan baik sangat diperlukan agar pelaksanaan program dapat berjalan secara efektif. Koordinasi yang baik antarinstansi akan membantu meminimalkan terjadinya tumpang tindih kewenangan serta memastikan bahwa setiap instansi dapat menjalankan perannya secara optimal dalam mendukung implementasi kebijakan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap penanganan stunting di Kabupaten Bandung, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program MBG telah mulai berjalan melalui koordinasi antara pemerintah daerah, instansi terkait, serta pihak sekolah sebagai pelaksana program di tingkat lapangan. Implementasi kebijakan ini didukung oleh berbagai kebijakan pemerintah yang menekankan pentingnya intervensi gizi dalam upaya percepatan penurunan stunting. Jika dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III, pelaksanaan program MBG dipengaruhi oleh empat faktor utama yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Dari aspek komunikasi, pemerintah daerah telah melakukan sosialisasi kebijakan melalui berbagai forum koordinasi, namun masih diperlukan peningkatan kejelasan informasi teknis kepada seluruh pelaksana program. Dari aspek sumber daya, pemerintah daerah telah memberikan dukungan anggaran serta melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah dalam pelaksanaan program, meskipun masih terdapat keterbatasan pada aspek sumber daya manusia dan sarana pendukung. Dari aspek disposisi, para pelaksana kebijakan pada umumnya menunjukkan sikap positif dan komitmen dalam mendukung program MBG karena dinilai dapat meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Sementara itu, dari aspek struktur birokrasi, pelaksanaan program telah melibatkan berbagai instansi pemerintah melalui mekanisme koordinasi lintas sektor, meskipun masih diperlukan penguatan koordinasi dan kejelasan pembagian tugas antarinstansi. Secara keseluruhan,

implementasi kebijakan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Bandung memiliki potensi yang besar dalam mendukung upaya penanganan stunting, namun masih memerlukan penguatan pada beberapa aspek agar pelaksanaannya dapat berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia Aghyantie Tajudin. (2026). Orkestrasi Strategi Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Stunting Di Kabupaten Bandung. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 13(1).
- Bhutta, Z. A., Das, J. K., Rizvi, A., Gaffey, M., Walker, N., Horton, S., Webb, P., Lartey, A., & Black, R. E. (2013). Evidence-based interventions for improvement of maternal and child nutrition What Can be Done and at What Cost? *The Lancet*. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(13\)60996-4](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)60996-4)
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Fund, U. N. C. (2021). *Improving child nutrition: The achievable imperative for global progress*.
- Hoddinott, J., Alderman, H., Behrman, J., Haddad, L., & Horton, S. (2013). The economic rationale for investing in stunting reduction. *Maternal & Child Nutrition*, 9.
- Jabar, T. (2024). *Pemkab Bandung siapkan anggaran program pemenuhan gizi*. Tribun Jabar.
- John W. Creswell. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.)*. SAGE Publications.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). *Profil kesehatan Indonesia tahun 2024*.
- Kompas. (2024). *Pemda Bandung alokasikan anggaran program makan bergizi gratis*. Kompas.
- Lutfia Bakari, Yahya Antu, & A. Y. K. (2023). Analisis Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting Dan Implikasinya Bagi Kemadirian Kesehatan Di Kabupaten Bone Bolango. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 10(4).
- Moleong Lexy. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Open Data Jawa Barat. (2024). *Persentase balita stunting berdasarkan kabupaten/kota di Jawa Barat*. <https://Opendata.Jabarprov.Go.Id>.
- Organization, W. H. (2018). *Reducing stunting in children: Equity considerations for achieving the global targets 2025*.
- Prendergast, A. J., & Humphrey, J. H. (2014). The stunting syndrome in developing countries. *Paediatrics and International Child Health*.
- Sugiyono, S. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Procrastination And Task Avoidance: Theory, Research and

- Treatment. New York: Plenum Press, Yudistira P, Chandra.
- Warastuti, R. A. (2023). Analisis Pengaruh Faktor Maternal Dan Pola Asuh Terhadap Psikomotorik Bayi Usia 3-24 Bulan Sebagai Skrining Pencegahan Stunting Di Kabupaten Bone Bolango. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi, Dan Pelayanan Publik*, 10(1).